
PERAN USAID DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI MELALUI SEA PROJECT TAHUN 2016-2021

Regita Cahyani¹

Abstract: USAID is a United State foreign aid agency that provides support to developing countries, including Indonesia with autonomy free from military functions. Through the USAID Policy Framework in 2011-2015 contained in the Country Development Cooperation Startegy (CDCS). Indonesia and the US agreed to Maritime Cooperation on October 26, 2015 and formed a Sustainable Marine and Fisheries Conservation Program, especially in Eastern Indonesia. Morotai Island Regency which is located in the outermost part of Maluku Province, is also one of the 14 USAID development priority areas. Morotai is directly adjacent to the Pacific Ocean and the Philippines, in addition to being a meeting point for 3 different WPPs, namely WPP 715, 716, and 717 with a total fishery potential of 1,714,158 tons per year. Morotai Regency has considerable potential to be exploited in terms of CPUE (Catch per Unit Effort) in 2015-2017. The findings state that the potential of capture fisheries in Morotai has not been fully realized and can still be further improved in its management and utilization. Using the concept of Sustainable Development (SDG's), the role carried out by USAID is to assist and support the Indonesian government in sustainable fisheries management through a framework called "USAID SEA Project 2016-2021". In the program agreed by Indonesia and the US, USAID plays a role to provide financial assistance and provide an implementation team named Tetra Tech to run the project. The results illustrate that the USAID Implementation Team used 5 Strategic Approaches. Of these Strategic Approach number two focused on improving fisheries management in WPP 715 through the use of four Technical Approaches including Ecosystem-based Sustainable Fisheries, Marine Protected Areas, Marine Spatial Planning, and Law Enforcement.

Keywords: United State, Morotai Island Regency, Fisheries, Sustainability, USAID SEA Project

Pendahuluan

Indonesia memiliki luas wilayah daratan seluas 1,91 juta km² dan perairan seluas 6,32 juta km². Memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang sangat berlimpah khususnya di sektor perikanan salah satunya kawasan perairan yang berada di bagian Timur Indonesia dan masuk menjadi wilayah *World Coral Triangle* (WCT). WCT merupakan kawasan dengan biota laut paling tinggi di dunia dan memiliki potensi ikan yang sangat melimpah dan beraneka ragam (DariLaut.id, 2016).

Kawasan Indonesia Timur diarahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk Tujuan Kerjasama Pembangunan Khusus karena menjadi wilayah yang paling sulit ditangani sesuai Kerangka Kebijakan USAID tahun 2011-2015 yang tertuang pada *Country Development Cooperation Startegy* (CDCS). USAID menetapkan 14 provinsi sebagai fokus wilayah prioritas pembangunan, dari ke 14 provinsi tersebut Maluku Utara,

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : regitacahyani937@gmail.com.

Maluku, Papua dan Papua Barat masuk menjadi provinsi prioritas pembangunan USAID (USAID Indonesia, 2013).

Salah satu kabupaten dalam 14 provinsi prioritas pembangunan tersebut ialah Kabupaten Pulau Morotai. Morotai merupakan pulau terluar yang berada di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik serta berbatasan dengan Negara Republik Palau dan Filipina. Dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No.18/PERMEN-KP/2014 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) terbagi atas 11 wilayah dan Morotai berada pada titik pertemuan 3 WPP yaitu 715, 716 dan 717. Potensi ikan di 3 WPP yang berada di Morotai sebanyak 1.714.158 ton/tahun (WPP 715 sebesar 631.704 ton/tahun) (SKPT Morotai, 2016).

Sekitar 5% dari potensi masing-masing WPP akan didaratkan di SKPT Morotai sebanyak 85.707,9 ton/tahun dengan *Maximum Sustainable Yield* (MSY) sebesar 68.566 ton/tahun dan produksi ikan eksisting yang ada di Morotai sebesar 6.272 ton/tahun. Tetapi, baru dimanfaatkan 9,15% dari potensi MSY dan masih ada 62.294 ton/tahun potensi yang belum dimanfaatkan. Oleh karenanya, perikanan di Morotai masih memiliki banyak peluang pemanfaatan yang cukup besar dimana perikanan tangkapnya berada dalam kondisi belum tereksplorasi secara baik maupun optimal dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan upaya pengelolaan, yang terlihat pada CPUE (*Catch per Unit Effort*) dari tahun 2015 hingga 2017 (Zulkifli Taib dan Ardin Umar, 2019: Hal,5).

Ada empat faktor penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di Morotai. Pertama, kapal yang dimiliki nelayan Morotai lebih banyak PTM (Perahu Tanpa Motor), PMT (Perahu Motor Tempel), kapal dengan ukuran kurang dari 5 GT, kapal dengan ukuran 5-10 GT. Sedangkan kapal dengan ukuran lebih dari 5 GT masih sangat terbatas (DJPRL KKP, 2015). Kedua, fasilitas pendukung yang tersedia di SKPT masih belum sepenuhnya ada dan cukup untuk menampung potensi ikan yang dimiliki seperti seperti *Cold Storage* berkapasitas 2.656 ton, *Air Blast Freezer* (ABS) kapasitas 5 ton sebanyak 177 unit dan pabrik es kapasitas 227 ton/hari (Tempo, 2015).

Ketiga, IUU *Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing dan *destructive fishing* (penangkapan ikan yang merusak) menggunakan bahan peledak, racun dan bom. Dan yang keempat, keterbatasan pemerintah dalam pendanaan yang menjadi hambatan dalam pembangunan SKPT bahkan, Indonesia membuka peluang masuknya bantuan luar negeri yang diberikan Jepang yaitu melalui *Official Development Assistance* (ODA) (Irmawati, 2021).

Berdasarkan empat faktor penyebab tersebut pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS melakukan berbagai upaya pengelolaan melalui proyek kerja yang diinisiasi langsung oleh USAID yaitu *Sustainable Ecosystems Advanced* (USAID SEA) dengan jangka waktu selama 5 tahun (2016-2021) yang merupakan bagian dari Program Konservasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan (*Marine Conservation and Sustainable Fisheries*). Atas permasalahan yang dihadapi, tujuan dari bantuan yang diberikan USAID melalui *SEA Project* yaitu mendukung pengelolaan perikanan dan kawasan perlindungan laut, meningkatkan produktivitas perikanan dan konservasi berkelanjutan dengan cara memperkuat kepemimpinan dari pemerintah lokal dan Kemen KP, meningkatkan penegakan hukum atas ancaman kawasan perairan dan memulihkan sektor perikanan masyarakat pesisir (Seafdec, 2021).

Landasan Konseptual

A. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan Berkelanjutan adalah program yang memiliki 17 tujuan dengan 169 target, yang dilihat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Dari 17 tujuan tersebut 6 diantaranya relevan untuk melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Morotai yaitu ekonomi, infrastruktur, ekosistem kelautan, iklim, ekosistem dan keberlanjutan (ICPH, 2022). SDG's memiliki tujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi sebagai agenda pembangunan dunia yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 dengan menggantikan MDG's (*Millenium Development Goals*) yang memiliki tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang telah disepakati dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Nurhayati, 2017:Hal 13).

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses pembangunan berupa lahan, kota, bisnis dan masyarakat yang memiliki prinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai sebuah pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Brundland Report PBB, 1987).

Dalam peraturan hukum di Indonesia Pasal 3 UU No.4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dijelaskan pengelolaan perlu dilakukan sebuah pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Artinya, untuk menunjang perekonomian masyarakat perlu adanya batas dalam menggunakan sumber daya alam (LinovHR, 2021).

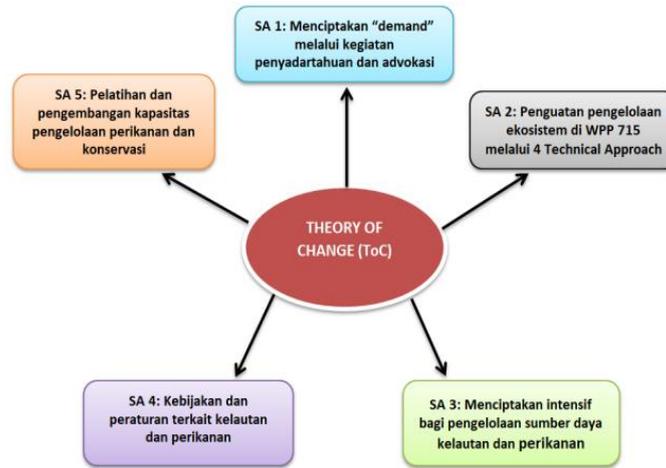
Dalam upaya percepatan untuk pencapaian target agar menjadi prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah. Maka SDG's selalu diperlukan untuk bersinergi dalam kebijakan perencanaan pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Di tingkat daerah, target SDG's diintegrasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMPD) dengan bentuk berbagai program, indikator dan target yang telah terukur, indikasi dan berbagai dukungan dalam hal pembiayaan (Triatmanto, 2021:Hal 1). Tiga pilar pembangunan berkelanjutan:

1. Keberlanjutan ekonomi dimana mendorong kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan jangka panjang dapat dicapai tanpa dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial dan budaya masyarakat.
2. Keberlanjutan sosial merupakan bentuk tanggung jawab sosial secara signifikan terjadi ketika komponen masyarakat yang stabil dan tidak stabil membutuhkan kebangkitan sumber daya yang sudah terkuras.
3. Keberlanjutan dalam kebudayaan yang mana kebutuhan kelestarian muncul dari tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hak budaya dan pelestarian warisan budaya (Indonesiasustainability.com).

B. USAID SEA Project

Dalam memastikan kegiatan proyek akan berkontribusi hingga berakhirnya proyek, maka rantai pencapaian tersebut dijelaskan pada *Theory of Change* (ToC). Tujuannya sebagai panduan untuk merancang kegiatan dan memberikan rangkaian implementasi. Dalam hal ini, kegiatan dan intervensi yang akan dilakukan oleh USAID berbasis pada lima Pendekatan Strategis (*Strategic Approach*) seperti dibawah ini.

Gambar 1. Pendekatan Strategis (*Strategic Approach*) USAID SEA Project



Rangkaian kegiatan dan intervensi USAID SEA yaitu:

1. Dengan menciptakan kesadartahuan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di laut yang mendukung upaya konservasi serta terkait advokasi bahwa pentingnya melakukan konservasi laut serta pengelolaan perikanan berkelanjutan.
2. Melakukan penguatan pengelolaan dalam perikanan berbasis ekosistem di WPP 715 dengan empat fokus kegiatan melalui Pendekatan Teknis (*Technical Approach*) yaitu perikanan berkelanjutan, kawasan konservasi, tata ruang laut dan upata penegakan hukum.
3. Memberikan berbagai keuntungan atau bonus bagi para pengelola sumber daya perikanan dengan ini USAID SEA akan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra kerja, sektor swasta dan perguruan tinggi .
4. Penguatan berbagai kebijakan terkait kelautan dan perikanan untuk mempercepat proses penyusunan, penguatan sistem disektor perikanan.
5. Menerapkan berbagai pelatihan, seminar dan pengembangan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya laut khususnya nelayan (Tetra Tech, 2018).

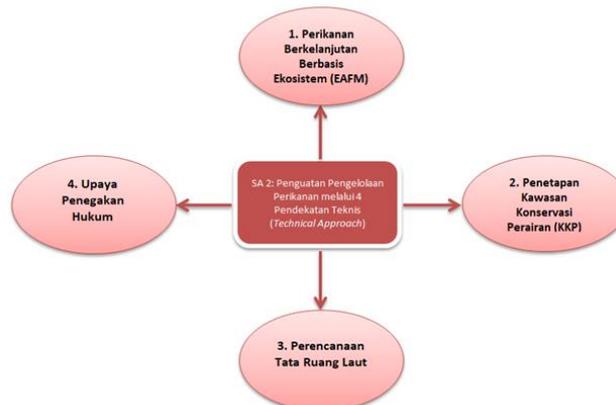
Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah deksriptif yaitu dengan menggambarkan peran USAID melalui *SEA Project* untuk melakukan pengelolaan perikanan berkelanjutan menggunakan data primer dan sekunder berasal dari buku, jurnal penelitian, akses internet, skripsi terdahulu, media massa serta literatur yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti serta menggunakan teknik analisa data yaitu metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Dengan menggunakan Pendekatan Teknis (*Technical Approach*) yang masuk dalam konsep Pendekatan Strategis (*Strategic Approach*) maka peran USAID dalam Program Konservasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan (*Marine Conservation and Sustainable Fisheries*) dari tahun 2016-2021 dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini.

Gambar 1. Empat Pendekatan Teknis (*Technical Approach*) USAID SEA Project



A. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Ekosistem atau *Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM)*

EAFM adalah pendekatan yang menerapkan pengelolaan perikanan melalui pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, manusia dan kesejahteraan sosial (Alan White, 2018). EAFM memiliki 3 tujuan untuk rencana pengelolaan pada tahun 2016 yaitu dengan mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan serta habitatnya secara berkelanjutan. Caranya, meningkatnya manfaat sosial dan ekonomi dari perikanan dan meningkatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan melalui sebuah pengelolaan.

Tabel 1. Hasil Implementasi Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan melalui USAID SEA

<p>Melakukan Kajian Perikanan</p>	<p>1. Kajian Stok dengan melakukan kolaborasi kerjasama antara Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Puriskan) dan Badan Riset Perikanan Laut (BRPL), DKP dan mitra proyek yaitu WWF, WCS, UKIP dan MDPI yang menjadi dasar acuan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk setiap lokasi target dan menjadikannya strategi pemanfaatan perikanan pertama di Indonesia.</p> <p>2. I-Fish atas dukungan IMACS dan berbagai sektor industri dan swasta memunculkan aplikasi berupa web untuk memberikan data perikanan dengan data yang sebenarnya.</p> <p>3. Spot Tracing yaitu mulai uji coba teknologi pelacakan dengan GPS di 5 lokasi WPP 715 sebelah timur secara acak dengan menempelkan perangkat bernama <i>Spot Trace</i> di sejumlah kapal dengan kode identifikasi unit kapal yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola web <i>I-Fish</i>.</p>
<p>Melaksanakan Intervensi Perikanan</p>	<p>1. Kontrol Input & Output dengan kurun waktu 2017-2019 telah disusun kerangka hukum dan kebijakan untuk perikanan pesisir dan laut dalam salah satunya memperkuat UU Perikanan No.45/2009 Pasal 85.</p> <p>2. PAAP (Pengelolaan Akses Area Perikanan), menghasilkan pengelolaan akses kegiatan perikanan dengan kontrol input dan output serta aturan penangkapan ikan di wilayah tertentu yang disebut dengan Kawasan Larang Ambil (KLA) untuk memaksimalkan produktivitas lokal.</p> <p>3. Pasar, mendorong upaya perikanan yang berkelanjutan dengan memeriksa dan memahami unsur rantai pasokan untuk mengurangi tantangan berbagai perikanan yang merusak di wilayah sasaran.</p>
<p>Pemberian Insentif Perikanan Berkelanjutan</p>	<p>1. Invest dengan memberikan fasilitas penyediaan perahu atau bahan bakar yang terjangkau melalui program SPDN (<i>Solar Package Dealer Nelayan</i>) dan uji coba ERR di 4 lokasi di WPP 715.</p> <p>2. Sertifikasi yaitu dilakukan dua skema sertifikasi yaitu sertifikasi <i>Fair Trade</i> dan <i>Marine Stewardship Council</i> (MSC) melalui pembentukan proyek perbaikan perikanan (<i>Fishery Improvement Project</i>).</p>
<p>Pemantauan Evaluasi & Pengelolaan Perikanan</p>	<p>1. Logbook terselenggaranya <i>Final Consultative Workshop on Electronic and Small-Scale Fishing Logbook Development</i> yang membahas rancangan dan revisi Peraturan Menteri KP Nomor 48 Tahun 2014 tentang <i>Logbook</i> dan melakukan penerapan <i>Electronic Logbook</i> yang di <i>launching</i> oleh Menteri KP Oktober 2018 di Bali.</p> <p>2. Daftar Kapal, memperkenalkan SIMKADA yang telah beroperasi secara daring, bahwa izin dan lisensi dikelola bersama dan pemilik kapal dapat memperoleh bukti pendaftaran lengkap atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).</p>

3. **Kartu**, adanya aturan Permen 16/2016 untuk memberlakukan penerapan kartu identitas nelayan dan menjadi persyaratan dokumen resmi untuk perizinan dan registrasi kapal yang berlaku selama 5 tahun.

4. **Daftar Rumpon**, melakukan skema pendaftaran rumpon dengan hasil untuk mengelola data-data pasti perikanan melalui proses inventarisasi.

Melalui *Economic Rate of Return* (ERR) yang menghasilkan tingkat komitmen untuk melaporkan praktik yang merusak ada pada skala cukup tinggi, tingkat komitmen untuk menghindari penggunaan praktik yang merusak pada skala cukup tinggi, tingkat komitmen untuk menghindari konsumsi ikan yang masih muda pada skala masih rendah dan tingkat komitmen untuk menghindari spesies ETP pada skala cukup tinggi (Alan White dan Tiene Gunawan, Hal.27).

B. Penetapan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao Tanjung Dehegila

Sebagai bentuk upaya memperbaiki stok perikanan dan menjamin ketersediaan sumber daya dalam jangka panjang USAID melakukan penetapan KKP Sesuai dengan Pasal 8, PP No.6 Tahun 2007. Ada 17 kawasan konservasi di Maluku Utara yang dicadangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Maluku dari tahun 2018-2038. Dalam Pasal 21 (I) Perda No.2 Tahun 2018, dari 17 kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan 3 diantaranya ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan Perikanan yaitu KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila sesuai Kepmen KP No. 67/KEPMEN-KP/2020. Penetapan tersebut dengan aturan bahwa kegiatan penangkapan ikan hanya diperbolehkan pada zona perikanan berkelanjutan dan diatur setelah kawasan atau zonasi KKP ditetapkan (Purwanto dan Ses Rini, 2020).

Pada tahun 2017 proyek USAID SEA juga melakukan pengumpulan data serta melakukan analisis biofisik dengan melihat habitat bentik, kondisi ekosistem sekitar, terumbu karang dan keragaman ikan karang. Selain itu, status perikanan dan ekonomi-sosial di beberapa lokasi khususnya data-data yang akan dibutuhkan untuk mendukung pembentukan kawasan konservasi di wilayah Morotai, dilakukan oleh mitra kerjasama proyek yaitu WWF, CTC dan WCS (Proyek USAID SEA, Hal.xiv).

Tabel 2. Portofolio Kawasan Konservasi Perairan Proyek USAID SEA

Maluku Utara	
Pulau Morotai	Seluas 58.011 ha
Pulau Guraici	Seluas 95.086 ha
Kec. Pulau Makian	Seluas 42.799 ha
Pulau Mare	Seluas 7.611 ha
Kepulauan Widi	Seluas 7.690 ha
Kepula Sula	Seluas 123.436 ha

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Kemen KP pada tahun 2018 melakukan penyusunan peraturan baru yaitu tentang pedoman teknis dan alat penilaian untuk pengembangan dan pengelolaan KKP bersama mitra kerjasama yaitu TNC. Salah satu peraturannya yaitu tentang desain dalam menjaring kawasan konservasi yang mencakup penetapan batas dan zonasi, pembentukan dan pengembangan kapasitas serta pengelolaan operasional. Maluku Utara menjadi provinsi pertama yang menerapkan pendekatan dalam peraturan berbasis sains untuk mendesai jejaring KKP. Dalam sistem administrasinya akan disusun dan diuji diwilayah kerja proyek USAID SEA yaitu WPP 715 untuk memaksimalkan produktivitas dalam jejaring KKP (Alan White, 2019).

C. Perencanaan Tata Ruang Laut

Saat diberlakukannya UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No. 27/2007 jo No.1/2014 sejak tahun 2016 setiap provinsi diberi mandat untuk membuat tata ruang lautnya. Dengan 6 langkah tersebut pada September 2018 akhirnya tercapai yang mana masing-masing provinsi akan menguraikan rencana tata ruang untuk pengelolaan kawasan seluas 17.312.391 ha dal dan am perairan WPP 715. Melalui pendekatan zonasi terintegrasi, USAID akan melakukan perencanaan tata ruang pesisir dan laut tak lain tujuannya untuk memperbaiki konservasi, meningkatkan serta memajukan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan, menyediakan ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas perikanan dan mendukung mata pencaharian di bawah wewenang provinsi. Hingga di tahun 2017 proses tata ruang laut telah memasuki tahap finalisasi dalam rencana alokasi ruang laut. Dukungan teknis untuk penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah diakui oleh pemerintah kedua Provinsi Maluku dan Maluku Utara. RZWP3K adalah sebuah kebijakan Perda Provinsi Maluku Utara untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang (Perda Maluku Utara No.16/2012).

Tabel 3. Target Zonasi RZWP3K untuk Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara Total Cakupan RZWP-3-K: 7.942.405 ha
PEMANFAATAN UMUM Pariwisata: 17.531 ha Olahraga air: 10.181 ha Situs sejarah bawah laut: 4.514 Pesisir dan pulau-pulau kecil: 1.928 Bawah air: 908 Perikanan tangkap: 6.832.284 ha Pelangis: 6.185.593 Pelangis dan demersal: 604.918 Demersal: 41.710 Perikanan Budidaya: 16.845 ha
KAWASAN KONSERVASI KKP: 566.315 ha

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
509.431 ha

Selain hal tersebut, 2 aplikasi untuk mempercepat pengembangan pengelolaan dan tata ruang laut yaitu dibuatnya aplikasi Telepon Seluler (Ponsel) *Ocean Eye* yaitu aplikasi yang digunakan oleh industri pariwisata bahari, diterapkan oleh operator selam dan wisatawan untuk melaporkan keberadaan spesies karismatik di area kawasan konservasi dan sekitarnya. Adanya aplikasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan sejumlah sumbangan atau donasi bagi masyarakat sebagai kontribusi dari wisatawan yang berwisata ke daerah pesisir untuk mendorong perlindungan biota. Dana tersebut menjadi alternatif pendapatan atas sumber daya laut yang mulai digunakan di Morotai akhir tahun 2018.

Serta aplikasi *TraceTales* yang gunanya mendata produk yang masuk, pengolahan hingga pengemasan untuk ekspor dan memiliki sistem internal yang dilengkapi dengan layar sentuh, pemindai *Quick Response Code* (QR Code) serta timbangan digital. Sistem tersebut juga memproduksi label dengan QR Code yang berisi data detail produk hingga dari berat produk dan nama nelayan. Aplikasi tersebut ada guna mengurangi kesalahan manusia seperti saat memasukan data menggunakan formulir kertas, sistem ini juga dapat meningkatkan validitas, perekaman dan penghitungan data. MDPI mengembangkan sistem pendataan tangkapan bersama nelayan mitra dari Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara (MDPI, 2019).

D. Upaya Penegakan Hukum

Bentuk upaya selanjutnya ialah dengan melakukan penegakan hukum agar pengelolaan perikanan terus berjalan optimal dibawah aturan dan hukum yang baik salah satunya dengan dengan meratifikasi kesepakatan internasional untuk mencegah, menghalangi dan memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau biasa disebut Port State Measures Agreement (PSMA) yang disahkan oleh FAO tahun 2009 (Alan White, 2020). Dalam pelaksanaannya, kapal perikanan asing diharuskan memiliki dokumen kapal lengkap sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Kapal perikanan asing berkewajiban untuk membuktikan bahwa kapal mereka memiliki izin yang sah dari negara bendera yang mereka gunakan serta izin operasi yang sah yang dibantu melalui dukungan NOAA OLE.

Pada Juni 2016 NOAA OLE memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para pengawas melalui USAID SEA berupa penerapan keterampilan praktis dan menggunakan skenario simulasi pemeriksaan di atas kapal. Tujuannya agar dalam pelatihan dapat menghasilkan rasa percaya diri para pengawas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kapal perikanan asing yang meminta layanan pelabuhan di Indonesia. Hasil dari kerjasama tersebut yaitu melatih 109 peserta dengan kualifikasi pria sebanyak 101 orang dan wanita sebanyak 8 orang. Selain itu, melalui masyarakat terdekat yang terdampak dan bisa mengekan keadilan langsung ketika adanya pelanggaran di perairan yaitu dengan membentuk SISWASMAS merupakan merupakan sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan telah diakui masyarakat setempat serta ramah lingkungan dalam mewujudkan pemanfaatan yang berkelanjutan sesuai dengan KepmenKP No.58/2001. SISWASMAS digunakan sebagai ukuran untuk

para pihak memastikan pemanfaatan sumber daya agar dapat dirasakan secara berkelanjutan.

USAID SEA juga mendukung pembentukan POKMASWAS tahun 2016 berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 dan Peraturan Kemen KP No. 58 Tahun 2001. Terdiri dari nelayan dan perwakilan masyarakat yang berperan aktif untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di perairan, dengan cara melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada petugas dan berkewajiban untuk melakukan peningkatan kesadaran di masyarakat luas dalam peraturan perikanan dan kelautan. Telah ada 23 anggota POKMASWAS berbasis desa yang tersebar di 3 provinsi lokasi dengan lebih dari 200 nelayan lokal yang mana anggotanya telah terdaftar dalam mendukung pengawasan perairan pesisir di masing-masing desa (USAID, 2020.Hal.01).

Kesimpulan

Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat melalui proyek USAID SEA mencapai beberapa hasil bersama tim pelaksana bernama Tetra Tech untuk mengelola perikanan berkelanjutan di Morotai:

1. Empat hasil dari implementasi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem yaitu, melakukan kajian perikanan: Kajian stok yang berupa kolaborasi kerjasama Puriskan dan BRPL untuk acuan RPP di setiap lokasi target, dikembangkannya aplikasi *I-Fish* agar semua sektor bisa berkontribusi memberikan data perikanan yang sesungguhnya dan *Spot Tracing* yang diuji cobakan secara acak dengan menempatkan perangkat *SPOT Trace* ke sejumlah kapal. Melaksanakan intervensi perikanan: Kontrol Input&Output atas hasil beberapa tahun terakhir telah banyak disusun berbagai kerangka hukum dan kebijakan serta memperkuat UU tentang Perikanan No.45/2009 Pasal 85, PAAP yaitu mengelola akses kegiatan perikanan agar melakukan penangkapan ikan di wilayah tertentu dengan menerapkan KLA dan mendorong upaya perikanan agar pasokan pasar terus mencapai rantai berkelanjutan dengan mengurangi berbagai tantangan. Pemberian insentif perikanan berkelanjutan: melakukan invest dengan penyediaan perahu atau bahan bakar melalui program SPDN yang disponsori pemerintah dan uji coba ERR di WPP 715 bagian timur dan melakukan sertifikasi dengan 2 skema yaitu *Fair Trade* dan MSC dan yang terakhir ialah pemantauan evaluasi dan pengelolaan perikanan: *Logbook* dengan melakukan penerapan *electronic logbook* yang telah di *launching* oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Oktober 2018, menerapkan daftar kapal dengan memperkenalkan SIMKADA secara daring yang berhasil mendaftarkan 1.639 kapal, memberlakukan kartu untuk nelayan sesuai Permen 16/2016 yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui dan mulai adanya skema pendaftaran rumpon untuk pengelolaan perikanan di 3 provinsi termasuk Morotai.
2. Penetapan TWP Rao-Tanjung Dehegila sesuai KepmenKP No. 67/KEPMEN KP/2020 dengan mengatur kegiatan penangkapan ikan sesuai kawasan dan zonasi di dalam kawasan yang telah ditetapkan.
3. Perencanaan tata ruang laut bahwa sesuai Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No. 27/2007 jo No.1/2014 bahwa sejak 2016 setiap provinsi telah diberi mandat dalam membuat tata ruang laut. Tahun 2017 tata ruang laut sudah memasuki tahap finalisasi dalam rencana alokasi ruang laut, penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan telah diakui oleh pemerintah kedua Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

4. Upaya atas penegakan hukum yaitu bekerjasama dengan NOAA OLE untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para pengawas melalui penerapan keterampilan praktis dan menggunakan skenario simulasi pemeriksaan di atas kapal serta pembentukan SISWASMAS dan pembentukan anggota POKMASWAS yang berlandaskan bahwa perlindungan kepada masyarakat secara individu dan kelompok yang dijamin melalui UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Proyek USAID SEA di Morotai relatif terlaksana dengan baik mengingat banyaknya kebijakan, aturan, penerapan aplikasi dan pemanfaatan perikanan berlandaskan ekosistem berjalan dan menghasilkan pengelolaan yang signifikan walaupun belum sepenuhnya bisa memperbaiki perikanan secara menyeluruh di wilayah sasaran proyek kerja.

Daftar Pustaka

- Bappeda. “Pembangunan Berkelanjutan”. Terdapat di <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-berkelanjutan-1>
- B20 SUSTAINABILITY . “Sustainable Development Adalah: Pengertian dan 3 Pilarnya”. Terdapat di <https://indonesiasustainability.com/sustainable-development-adalah/>
- Darilaut.id. “Kawasan Timur Indonesia Kaya Sumber Daya Ikan”. Terdapat di <https://darilaut.id/berita/kawasan-timur-indonesia-kaya-sumber-daya-ikan>
- Dirjen Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “SKPT Morotai”. Terdapat di <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/1517-skpt-morotai>
- ICPH. “Sustainable Development Goals”. Terdapat di http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/
- Irmawati dan Patricia Benedicta W. 2021. “Bantuan Luar Negeri Jepang dalam SKPT Morotai, Maluku Utara”. Volume 4 No 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta
- LinovHR. “Pembangunan Berkelanjutan”. Terdapat di <https://www.linovhr.com/pembangunan-berkelanjutan/>
- Purwanto dan Ses Rini Mardiana. 2020. “Status Sumber Daya Ikan Dan Perikanan Kakap Dan Kerapu Di Perairan Laut Sekitar Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Serta Alternatif Strategi Pengelolaannya”. Kerjasama Antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Dengan Proyek USAID – Sustainable Ecosystem Advanced (USAID – SEA). Jakarta. Hal,10
- Taib, Zulkifli dan Ardin Umar. 2019. “Analisis Sosial Ekonomi Nelayan Tradisional Di Daerah 3t Kabupaten Pulau Morotai”. Vol.3 No.1. Universitas Pasifik Morotai. Maluku Utara
- Tempo.co. “Menteri Trenggono Siap Majukan Sektor KP Morotai”. Terdapat di <https://nasional.tempo.co/amp/1568986/qqmenteri-trenggono-siap-majukan-sektor-kp-morotai>

- Tetra Tech. 2018. “*USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) Project*”. Laporan Tahunan April 2016-September 2017. The United States Agency for International Development (USAID). Jakarta
- Triatmanto, Boge. 2021. “*Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG's)*”. Penerbit Selaras. Malang. Hal,1
- SKPT Morotai. “*Profil Umum SKPT Morotai*”. Terdapat di <https://kkp.go.id/SKPT/Morotai/page/1115-profil-umum-skpt-morotai>
- White, Alan. 2019. “*Newsletter Talking SEA. Melindungi Ekosistem Laut Indonesia untuk Generasi Mendatang. Menuju Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Efektif*”. Proyek USAID Sustainable Ecosystem Advanced (USAID SEA). Edisi No3/Januari. Jakarta